



# RENCANA KERJA TAHUN 2024

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini sebagaimana amanat pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Dokumen Renja ini mengacu pada RKPD Tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026, yang menurut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki 3 (tiga) urusan wajib yaitu Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

Akhirnya, kami berharap semoga Dokumen Rencana Kerja yang disusun ini, dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi.

Pontianak, Juli 2023  
Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Barat,



D. Zamroni, S.STP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19800307 199810 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	5
C. Maksud dan Tujuan .....	9
D. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II     HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN              LALU</b>	
A. Evaluasi Pencapaian Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah .....	18
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	18
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	20
B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	22
C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	23
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT              DAERAH</b>	
A. Indikator Kinerja .....	65
B. Kelompok Sasaran .....	69
C. Kebutuhan Pendanaan Indikatif .....	74
D. Sumber Dana .....	75

BAB V	PENUTUP .....	76
LAMPIRAN I	TABEL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024	
LAMPIRAN II	TABEL CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat Perencanaan pembangunan juga dimaksudkan untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut, secara makro perencanaan pembangunan di daerah disusun menurut hierarki yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat merupakan OPD yang dibentuk tahun 2017. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terdapat pembagian kewenangan yang diserahkan kepada daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan 3 urusan pemerintahan yaitu Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.

Diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah. Adapun urusan yang diserahkan kepada daerah mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membagi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan dibagi menjadi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

Urusan non pelayanan dasar terdapat 18 urusan yang diantaranya terdapat urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian, yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya diperkuat juga melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagai acuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja Satuan Kinerja Perangkat Daerah sangat terkait dengan dokumen RKPD dan RENSTRA yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Rencana Kerja merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, RENSTRA SKPD dan Rencana Kerja. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan

sub kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja wajib menyusun Dokumen Renja. Rencana Kerja merupakan sebuah dokumen rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi alat ukur penilaian capaian kinerja perangkat daerah. Rumusan Dokumen Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik memiliki peranan yang sangat penting dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Sebagai OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika telah merumuskan tujuan dan sasaran yang kemudian diuraikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan dokumen RPJMD dan RENSTRA. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menjalankan peran mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan memberikan layanan informasi, pengembangan teknologi informasi komunikasi, menjamin keamanan informasi dan menyediakan data statistik sektoral yang terintegrasi.

## **1. KEDUDUKAN**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **2. TUGAS POKOK**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## **3. FUNGSI**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik;
- b. Perumusan kebijakan di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik;
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengekoordinasian dan pembinaan teknis di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik;



- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik;
- g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di Lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan administrasi di Lingkungan Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. STRUKTUR/SUSUNAN ORGANISASI**

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Informasi Publik;
- d. Bidang Komunikasi Publik;
- e. Bidang Aplikasi Informatika;
- f. Bidang Persandian dan Statistik;
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **B. LANDASAN HUKUM**

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan dan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT Fund);
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
31. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk (Masterplan) Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019;
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Satu Data;
33. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026;
35. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

- a. Sebagai langkah untuk menjaga konsistensi arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Barat Periode 2024-2026;
- b. Penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026;
- c. Sebagai acuan resmi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam menentukan dan melaksanakan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 yang akan dibiayai dari APBD Provinsi Kalimantan Barat.

### **2. TUJUAN**

- a. Mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran program dan kegiatan dalam mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah;
- b. Mewujudkan efisiensi alokasi anggaran dalam pembangunan daerah;
- c. Partisipasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam perencanaan dan pembangunan.

## **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I   Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

- BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
  - A. Evaluasi Pencapaian Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  - B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
  - E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
  - A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
  - C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
  - A. Indikator Kinerja
  - B. Kelompok Sasaran
  - C. Kebutuhan Pendanaan Indikatif
  - D. Sumber Dana
- BAB V. PENUTUP
- LAMPIRAN

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### A. EVALUASI PENCAPAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 kegiatan dan 8 sub kegiatan;
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari 2 kegiatan dan 12 sub kegiatan;
- c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan;
- d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan.

Dalam rangka pencapaian program prioritas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 telah didukung melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.845.371.454,- dan mengalami penyempurnaan anggaran berkurangnya sebesar Rp. 40.000.000,- sehingga pagu penyempurnaan menjadi Rp. 28.805.371.454,00

**TABEL : 2.1**  
**Realisasi Program dan Kegiatan Sampai Dengan Bulan Juni**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat**  
**Tahun Anggaran 2023**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	28.805.371.454,00	12.446.964.533,00	43,21
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	28.123.688.454,00	12.119.197.970,00	43,09

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.866.178.354,00	4.747.085.313,00	40,01
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	316.130.100,00	138.386.400,00	43,78
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	133.005.900,00	65.679.600,00	49,38
2.16.01.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.111.800,00	1.718.800,00	8,99
2.16.01.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.412.400,00	2.658.300,00	13,02
2.16.01.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.000.000,00	1.000.000,00	5,26
2.16.01.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20.000.000,00	512.300,00	2,56
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.400.000,00	36.352.600,00	94,67
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.200.000,00	30.464.800,00	46,02
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.353.206.824,00	3.505.091.265,00	41,96
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.944.714.524,00	3.337.426.725,00	42,01
2.16.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	266.400.000,00	136.700.000,00	51,31
2.16.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	71.000.000,00	5.590.050,00	7,87
2.16.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.000.000,00	-	0,00
2.16.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.092.300,00	14.518.090,00	72,26
2.16.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24.000.000,00	8.356.400,00	34,82
2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.587.500,00	8.031.380,00	16,53
2.16.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah SKPD	21.087.500,00	8.031.380,00	38,09
2.16.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.500.000,00	-	0,00



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.16.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	247.074.625,00	92.886.058,00	37,59
2.16.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.604.625,00	40.445.625,00	99,61
2.16.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	103.000.000,00	26.583.200,00	25,81
2.16.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	17.000.000,00	3.770.400,00	22,18
2.16.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	23.000.000,00	4.483.600,00	19,49
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	39.490.000,00	17.603.233,00	44,58
2.16.01.1.0511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23.980.000,00	-	0,00
2.16.01.1.1.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	447.272.012,00	132.422.410,00	29,61
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.998.750,00	-	0,00
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.224.600,00	43.399.400,00	98,13
2.16.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.753.600,00	10.297.950,00	95,76
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.960.000,00	9.520.000,00	14,88
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.999.800,00	714.000,00	3,57
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.400.000,00	2.520.000,00	39,38
2.16.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	19.824.000,00	3.000.000,00	15,13
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.111.262,00	62.671.960,00	26,32
2.16.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000,00	299.100,00	1,99
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.908.000,00	171.550.000,00	42,79
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	69.302.000,00	173.900.000,00	250,93
2.16.01.1.07.06	Pengadaan Barang dan Mesin Lainnya	314.606.000,00	171.550.000,00	54,53
2.16.01.1.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.000.000,00	-	0,00

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	1.696.674.993,00	632.993.000,00	37,31
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.105.605,00	-	0,00
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.000.000,00	61.737.032,00	33,74
2.16.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.900.000,00	-	0,00
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.502.669.388,00	571.255.968,00	38,02
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.324.300,00	65.724.800,00	18,45
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.750.000,00	18.561.000,00	44,46
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.040.000,00	27.991.300,00	33,71
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	231.534.300,00	19.172.500,00	8,28
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.304.899.800,00	2.203.764.580,00	51,19
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	4.304.899.800,00	2.203.764.580,00	51,19
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	180.499.000,00	25.762.300,00	14,27
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.250.000.000,00	484.985.460,00	38,80
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	200.000.000,00	48.151.500,00	24,08
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	1.313.502.200,00	775.326.800,00	59,03
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	150.980.600,00	41.138.400,00	27,25
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	119.918.000,00	53.351.420,00	44,49
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.000.000.000,00	700.000.000,00	70,00
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	90.000.000,00	75.048.700,00	83,39

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	11.952.610.300,00	5.168.348.077,00	43,24
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	7.917.557.700,00	3.236.805.177,00	40,88
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provins	108.537.900,00	19.124.500,00	17,62
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	7.809.019.800,00	3.217.680.677,00	41,20
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	4.035.052.600,00	1.931.542.900,00	47,87
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	69.707.800,00	16.129.300,00	23,14
2.16.03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	43.274.300,00	22.531.500,00	52,07
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.900.508.500,00	1.420.973.950,00	74,77
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	117.655.300,00	45.112.300,00	38,34
2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	44.710.800,00	20.179.100,00	45,13
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	949.742.300,00	13.166.550,00	1,39
2.16.03.1.02.08	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	39.595.900,00	17.174.650,00	43,37
2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	738.647.100,00	347.495.700,00	47,04
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	47.850.500,00	5.022.350,00	10,50
2.16.03.1.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	83.360.100,00	23.757.500,00	28,50

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	390.792.800,00	226.080.745,00	57,85
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	390.792.800,00	226.080.745,00	57,85
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Provinsi	390.792.800,00	226.080.745,00	57,85
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	213.684.000,00	126.935.745,00	59,40
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	91.028.000,00	22.326.100,00	24,53
2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	86.080.800,00	76.818.900,00	89,24
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	290.890.200,00	101.685.818,00	34,96
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	290.890.200,00	101.685.818,00	34,96
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	193.966.000,00	68.993.818,00	35,57
2.21.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi.	26.770.000,00	10.051.109,00	37,55
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	64.561.700,00	29.642.709,00	45,91
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahann Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	7.275.400,00	4.140.000,00	56,90
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamnan Informasi Pemerintah Daerah Orovinsi	95.358.900,00	25.160.000,00	26,38
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antara Daerah Provinsi	96.924.200,00	32.692.000,00	33,73
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemrintah Daerah Provinsi	96.924.200,00	32.692.000,00	33,73

## B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dapat disajikan berdasarkan 5 sasaran pada Tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	(%)
1. Terselenggaranya Pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pemprov Kalbar	Predikat dan Nilai keterbukaan informasi publik	Informatif / Zona Hijau 90 - 100	Informatif 93,46	100%
<b>Capaian Sasaran Strategis 1</b>				<b>100%</b>
2. Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	2,60 - 3.50	3.42	100%
<b>Capaian Sasaran Strategis 2</b>				<b>100%</b>
3. Meningkatnya Jumlah Dataset Statistik Sektoral yang Terintegrasi Setiap Tahun	Jumlah Total Dataset Statistik yang Terintegrasi Per Tahun	7.000	12.084	172,62%
<b>Capaian Sasaran Strategis 3</b>				<b>172,62%</b>
4. Terselenggaranya Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Status Kesiapan Keamanan Informasi - Baik (91-100) - Cukup Baik (76-90) - Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar (60-75) - Tidak Layak(0-59,9)	Baik (91-100)	Tidak Layak (55,5)	55,5%
<b>Capaian Sasaran Strategis 4</b>				<b>55,5%</b>
5. Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja	BB (76,00)	BB (76.35)	100%
	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (88,97)	BB (75,15)	84,46%
<b>Capaian Sasaran Strategis 5</b>				<b>92%</b>
<b>Capaian Sasaran Strategis Seluruhnya</b>				<b>104,02 %</b>

### **C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 berikut dirumuskan isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi, sehingga perlu adanya pembinaan dan koordinasi kepada seluruh badan publik pada perangkat daerah untuk mencapai kualifikasi informatif dan memberikan layanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat;
2. Belum optimalnya teknologi informasi dan komunikasi oleh seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga perlu dilakukan inovasi secara terus menerus;
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi keamanan informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. Belum terintegrasinya seluruh data statistik Kalimantan Barat secara optimal dalam satu portal yang mudah diakses oleh perangkat daerah dan masyarakat.

### **D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat disusun dengan pagu indikatif sebesar Rp. 28.544.711.874,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*). Adapun rincian rancangan awal Rencana Kerja tersebut terlampir dalam Lampiran I.

**E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika juga tetap mengedepankan masukan dan saran yang didasarkan pada isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat.

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

#### Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024

Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) disusun untuk melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024, agar RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. *Major Project* menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP dan APBN tahunannya.

Pendanaan Proyek Prioritas Strategis ini dengan mengintegrasikan antar sumber pendanaan melalui Belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Daerah, Masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*) antara lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance* serta *Output Based Transfer/Hibah* ke daerah.

Adapun Major Project pada urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Daftar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*)**  
**RPJMN 2020-2024**

No.	Major Project	Manfaat Proyek	Pelaksana
1.	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berkurangnya kesenjangan digital</li><li>• Menyediakan layanan internet cepat untuk mendukung digitalisasi sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan</li></ul>	KEMENKOMINFO



No.	Major Project	Manfaat Proyek	Pelaksana
2.	Penguatan NSOC–SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menurunnya insiden serangan siber;</li> <li>▪ Meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antar <i>stakeholder</i> terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya).</li> </ul>	BSSN

Transformasi Digital, pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan Big Data.

Peran TIK menjadi semakin besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur TIK perlu ditingkatkan sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, Selanjutnya untuk mendorong pelayanan dasar dan meningkatkan kegiatan sosial ekonomi, infrastruktur TIK perlu diperluas agar menjangkau seluruh daerah dan seluruh kelompok masyarakat. Peningkatan keandalan dan kecepatan pelayanan informasi memerlukan perluasan jaringan tetap pitalebar (*fixed broadband*) dan jaringan bergerak pitalebar (*mobile broadband*).

Jaringan tetap pitalebar perlu diperluas hingga menjangkau kecamatan sementara akses telekomunikasi dan internet melalui jaringan pitalebar perlu diperluas hingga seluruh desa. Saat ini masih terdapat 7.971 desa belum terlayani akses telekomunikasi dan internet karena tantangan geografis seperti daerah pegunungan dan daerah terpencil. Perluasan jaringan tetap pitalebar dan jaringan bergerak pitalebar akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Di samping itu, migrasi penyiaran dari sistem analog ke sistem digital juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi dan kualitas

penyiaran khususnya televisi. Digitalisasi penyiaran akan memberikan ruang pemanfaatan spektrum frekuensi untuk kebutuhan penggunaan lain (*digital dividend*).

Selanjutnya terkait Dinamika Ancaman Siber, penguasaan teknologi dan akses terhadap internet yang signifikan berimplikasi pada potensi ancaman siber. Jumlah serangan siber berbentuk *malware* yang sangat tinggi ke Indonesia merupakan cerminan dari dinamika ancaman keamanan nasional yang terus meningkat. Ancaman tersebut semakin serius karena regulasi, infrastruktur, dan SDM.

## B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yaitu "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi". Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, yang harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan dicapai. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dirumuskan untuk masing-masing, yaitu :

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja**  
**Tahun 2024**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pemprov Kalbar	Predikat dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif 90 -100

informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi	Terselenggaranya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah Yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	3,50 – 4,20
	Tercapainya Kriteria Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Cukup (1,8 - 2,6)
	Terselenggaranya Layanan Persandian Untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Yang Berkualitas	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	75%
	Terlaksananya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Nilai dan Predikat SAKIP OPD	BB ( 70 - 80 )
2. Nilai dan Predikat RB OPD		BB ( 70 - 80 )	

### C. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

#### 1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

##### a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

##### 1) *Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik*

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, dengan target yang ingin dicapai adalah 5 Dokumen.

##### a. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Monitoring opini diperlukan untuk mengetahui pendapat publik terhadap aktualisasi program sebagai implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada kepentingan publik. Adapun monitoring aspirasi publik dilakukan untuk mengetahui perkembangan aspirasi masyarakat terkait penerapan kebijakan melalui program yang berdampak luas pada kepentingan publik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi tantangan untuk mengimplementasikan monitoring opini dan aspirasi publik bukan hanya dilakukan secara konvensional (manual) yakni dari media cetak dan elektronik akan tetapi dilakukan juga melalui media monitoring berbasis teknologi informasi. Pemantauan manual dilakukan kepada media massa diantaranya Tribun Pontianak, Media Kalbar, LKBN Antara, Kalbar Online, Suara Kalbar dan Pontianak Post. Sedangkan untuk media sosial yang dipantau secara manual adalah Facebook dan Instagram. Terkait komentar masyarakat pemantauan dilakukan terhadap Pontianak Informasi dan Pontianak Media. Khusus Kalbar Informasi belum banyak menjadi perhatian masyarakat. Adapun hasil pemantauan diatas dirangkum menjadi buku yang disusun secara berkala per triwulan.

b. Penerbitan Buletin Kominfo

Buletin merupakan salah satu cara bagi Diskominfo Provinsi Kalbar guna mempublikasikan kepada masyarakat umumnya dan perangkat daerah khususnya untuk menginformasikan topik dan aspek pelaksanaan tugas dalam jangka waktu tertentu. Penyebaran informasi mengenai rangkuman secara berkala pelaksanaan kegiatan di Diskominfo Provinsi Kalbar melalui media cetak Buletin pada tahun 2024 dilakukan melalui 2 (dua) kali penerbitan. Buletin Berita Satu akan menampilkan ciri khas yang dikemas selain menggunakan teks dalam pemerintaanya juga menyertakan foto-foto yang memfokuskan mengenai penyelenggaraan pembangunan Kalimantan Barat dan potensi yang dikandungnya.

c. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Diskominfo menjalankan salah satu bagian dari Pelayanan Publik yakni memberikan pelayanan informasi dan Dokumentasi. Sesuai dengan Permenkominfo Nomor 8

Tahun 2019 tentang Pembagian Urusan Konkuren Komunikasi dan Informatika maka di Diskominfo terdapat jabatan PPID/PPID Utama dan PPID Pembantu/PPID Pelaksana. Penyebaran informasi mengenai kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan secara Umum di Diskominfo dilakukan dengan peliputan yang bermuara pada penyampaian berita maupun infografis pada website Diskominfo. Salah satu upaya evaluasi terhadap penyelenggaraan sebahagian pelayanan publik tersebut secara berkala dan berkelanjutan ditempuh dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Agar masyarakat dapat berpartisipasi maka dilaksanakan survey kepuasan masyarakat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Diskominfo. Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan diantaranya untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan Diskominfo guna mengetahui prioritas perbaikan layanan Diskominfo kedepannya.

d. Penyewaan Aplikasi Monitoring

Pemantauan isu publik pada platform media massa digital dan media sosial akan efektif dilaksanakan melalui sarana media monitoring berbasis teknologi informasi yang dirancang secara khusus. Perangkat tersebut secara otomatis dirancang untuk dapat melakukan pencarian ataupun pelacakan dengan menggunakan *keyword*. Dengan demikian perangkat yang digunakan untuk memudahkan aktivitas monitoring akan lebih berarti bila ditahun selanjutnya didukung dengan adanya keahlian analis media sehingga konsultan media profesional dapat bergabung mendukung pelaksanaan program di Diskominfo.

e. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD)

Dilaksanakannya FGD pada sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik memiliki 2 (dua) tujuan utama. Pertama, untuk menyamakan setiap persepsi atas suatu isu ataupun topik tertentu yang merupakan hasil dari pantauan informasi dan aspirasi publik di media. Kedua, untuk mendapatkan berbagai informasi yang lebih valid melalui *cross check* data dan informasi dari berbagai sumber dari pertemuan dengan khalayak sasaran dan *stakeholder* atau pemangku kepentingan. *Focus Group Discussion* dilaksanakan dengan mengundang narasumber yang berperan penting dalam masalah yang akan dibahas sehingga pada akhirnya akan melahirkan kesepakatan dan juga terbangunnya pengertian terhadap isu yang berkembang.

**2) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui kerjasama dengan media massa cetak dalam bentuk liputan khusus (*advertorial*) dan *even by order* dengan mengangkat isu aktual sesuai dengan tujuan yang telah digariskan berdasarkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat melalui publikasi Kegiatan Pemerintahan secara Periodik guna membangun citra positif pemerintah di masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kualitas informasi pembangunan kepada

masyarakat dalam mengimbangi pemberitaan media yang cenderung melemahkan wibawa pemerintah dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.

### **3) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

#### **a) Tersedianya Informasi Publik melalui Media Sosial**

Penggunaan media sosial telah membentuk dan mendukung cara baru dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Media sosial menawarkan cara yang lebih cepat dan tepat untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi secara daring (dalam jaringan/online). Dengan melihat efektivitas media sosial dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan masyarakat, hubungan masyarakat (humas) pemerintah harus mampu memanfaatkan media sosial untuk meraih perhatian dan dukungan khalayak luas serta tidak lagi semata-mata bertahan dengan cara-cara komunikasi yang konvensional.

Tujuan pelaksanaan Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Publik adalah pemanfaatan teknologi informasi (*e-Government*), strategi komunikasi, manajemen perubahan (*change management*), manajemen pengetahuan (*knowledge management*), dan penataan tata laksana (*business process*).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Kominfo menggunakan berbagai bentuk media komunikasi berbasis internet, seperti situs, portal berita, blog, dan media sosial. Bahkan, media sosial telah menjadi salah satu media yang paling banyak digunakan, baik oleh perseorangan maupun organisasi/lembaga. Media sosial bersifat dua arah dan terbuka, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah

berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan aplikasi berbasis internet, yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi internet yang bersifat dua arah (Web 2.0), yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran isi antar pengguna.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadikan media sosial sebagai sarana dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat terkait program dan kebijakan pemerintah, maksud penyelenggaraan Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Publik yaitu sebagai sarana penyebaran informasi, opini publik, dinamika percakapan dan diskusi, bahkan telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang telah terjangkau infrastruktur komunikasi dan informatika. Penggunaan dan pemanfaatan media sosial merupakan salah satu cara dalam mempromosikan serta menyebarkan program dan kebijakan pemerintah serta berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga mencapai saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Pengguna media sosial pada akhirnya membangun sebuah komunitas sehingga terjalin komunikasi yang intensif. Proses komunikasi karena ketertarikan yang sama terhadap suatu hal akan cepat membangun opini publik yang berdampak pada citra dan reputasi pemerintah. Oleh karena itu, pada masa sekarang dan akan datang, praktisi humas pemerintah perlu memperhatikan peran media sosial serta terlibat secara aktif di dalamnya.

Pada saat ini hampir seluruh lembaga pemerintah telah menggunakan satu atau lebih media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi. Media sosial terbukti mampu melibatkan khalayak secara aktif dan menjaring masukan dari berbagai kalangan sehingga menciptakan kearifan orang banyak (wisdom



of the crowds). Namun, apabila tidak dikelola dengan baik dan bijak, penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi kehumasan dapat membawa dampak negatif. Berbagai masukan dan komentar, baik positif maupun negatif, bisa masuk tanpa dapat dikendalikan sehingga mempengaruhi citra lembaga.

Banyak di antara akun-akun yang mengatasnamakan instansi pemerintah sebenarnya bukan akun resmi lembaga yang bersangkutan, melainkan akun individu pegawai atau pihak yang berafiliasi dengan lembaga tersebut. Apabila penggunaan media sosial yang mengatasnamakan instansi tidak disertai aturan dan pengendalian yang tegas dan mengikat serta pengelolaan yang profesional, dapat mengakibatkan ketidakjelasan pesan dan kebingungan khalayak sehingga berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan, pada khususnya, dan pemerintah pada umumnya. Sebaliknya, apabila penggunaan media sosial diawali dengan pengertian dan pemahaman yang lengkap, pengaturan yang tepat, serta pengelolaan yang baik akan diperoleh manfaat dari penggunaan media sosial di instansi pemerintah.

b) Terselenggaranya Pengelolaan Website  
*<http://kalbarprov.go.id>*

Sistem informasi merupakan sebuah sistem yang berisi jaringan SPD (Sistem Pengolahan Data) yang dilengkapi dengan kanal-kanal komunikasi yang digunakan dalam sistem organisasi data, elemen proses dari sistem informasi adalah mengumpulkan data, mengolah data dan menyebarkan informasi. Dalam sistem informasi data, informasi atau pengetahuan mengalir dibawa oleh dokumen atau media komunikasi elektronik seperti telephone atau jaringan komputer. Syarat-syarat terbentuknya sistem informasi berbasis web adalah :

- Tersedianya web server baik statis maupun dinamis;
- Tersedianya software pemograman web berbaris server jika ingin membuat web; dan
- Tersedianya database.

Dalam upaya membangun jaringan informasi yang lebih luas dan terintegrasi dengan baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang secara teknis bertanggung jawab terhadap pengelolaan web portal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan utama adalah untuk menyediakan berita/informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Layanan yang telah dilakukan selama ini perlu dilakukan peningkatan setiap tahunnya baik dari sisi teknologi web yang diimplementasikan maupun pemutakhiran informasi/berita.

#### **4) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik, dengan target yang ingin dicapai adalah 6 Dokumen.

##### **a) Peliputan dan Dokumentasi**

Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi merupakan kegiatan yang mendukung dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat terkait promosi daerah, pembangunan daerah, serta eksplorasi potensi daerah melalui kegiatan/*event* yang diselenggarakan. Dari hasil peliputan yang disebar luaskan kepada masyarakat, diharapkan dapat berguna untuk menambah informasi bagi masyarakat mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal pembangunan, baik infrastruktur maupun kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Barat. Termasuk juga lebih

mengenalkan kepada dunia, potensi wisata alam dan kekayaan kultural yang dimiliki oleh Kalimantan Barat.

b) Infografis RLPPD (Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya pada pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan RLPPD memuat :

- capaian kinerja makro;
- ringkasan Capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
- hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya;
- ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
- inovasi daerah.

RLPPD disampaikan oleh kepala daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada pemerintah pusat. Penyampaian RLPPD dipublikasikan melalui paling sedikit 3 (tiga) media cetak harian dan/atau media online, papan pengumuman yang mudah diakses publik, dan website resmi pemerintah daerah.

Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c) Pembinaan Keterbukaan Informasi Publik Daerah pada Badan Publik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota (PPID Utama)

Sejak diundangkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2008 dan berlaku efektif secara nasional pada tanggal 30 April 2010, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung dan melaksanakannya. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasasn hukum yang berkaitan denga (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi di Badan Publik.

- d) Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (PPID Pembantu/Pelaksana)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Keberadaan UU No 14 tahun 2008 sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1). Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik (2). Kewajiban Badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/profesional dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

- e) Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Rakor PPID)

Tujuan dilaksanakannya Rakor PPID adalah untuk meningkatkan sinergi dan penguatan peran fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta meningkatkan pelayanan informasi dan koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkup perangkat daerah Prov. Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

Pelaksanaan rapat koordinasi PPID dapat menyatukan langkah, meningkatkan kerjasama dalam upaya memperkuat komitmen dengan dengan langkah-langkah pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Kegiatan Rakor PPID ini mengundang narasumber dari Pusat dan Daerah dengan jumlah peserta sebanyak 150 orang.

f) Rapat Uji Konsekuensi (Informasi Yang Dikecualikan) 45 OPD

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengklasifikasikan informasi terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

Informasi yang dikecualikan harus didasarkan pada pengujian konsekuensi. Uji Konsekuensi Informasi adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.

Dalam melakukan Uji Konsekuensi, PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik.

**5) Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Layanan Hubungan Media, dengan target yang ingin dicapai adalah 3 Layanan.

Maksud penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai percepatan pemahaman masyarakat tentang siaran digital dan segera beralih ke siaran digital.

Diharapkan masyarakat mengikuti perkembangan dunia digital secara baik, produktif, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan dalam berinteraksi di ruang digital baik dari segi etika, kemampuan, keamanan dan budaya digital.

Bertujuan untuk mendorong semua mitra di sektor penyiaran melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan Literasi digital serta meningkatkan penyebaran konten-konten positif oleh masyarakat sipil, pemerintah, dan media digital. Meningkatkan jumlah masyarakat yang memahami pentingnya Literasi Media Digital dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemampuan memilih dan memilah tayangan yang bermanfaat secara bijak dan benar merupakan tujuan utama dari kegiatan Layanan Hubungan Media.

**6) Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

a. Maksud Pelaksanaan sub kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan adalah Dengan diselenggarakannya Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra pemerintah daerah, hasil yang diharapkan antara lain :

1. KIM bisa berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi di tingkat desa atau kelurahan.
2. KIM juga bisa menjadi penampung aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada pemerintah daerah.

Dengan terbentuknya KIM diharapkan akses informasi yang sesuai kebutuhan masyarakat kian terbuka dan mudah.

- b. Pada Tahun 2024 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan dana Hibah dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

#### **7) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya, dengan target yang ingin dicapai adalah 250 Orang.

- a) Peningkatan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang Komunikasi Publik sebanyak 250 peserta ASN di lingkungan Pemprov Kalbar. Masih minimnya SDM di kalangan ASN yang handal dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik dan pengolahan Media Sosial dalam rangka mengelola informasi media social pemerintah daerah mengenai program-program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, mengakibatkan informasi mengenai program-program pembangunan tidak tersampaikan atau tersosialisasikan kepada masyarakat dengan maksimal. Hal ini salah satunya disebabkan masih minimnya pengetahuan tentang jurnalistik dan Pengolahan Media Sosial Pemerintah Daerah dengan Sumber Daya Manusia yang bertugas di bidang komunikasi dan informasi publik terhadap media social pemerintah daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat berusaha untuk



meningkatkan Sumber Daya Manusia di kalangan ASN bidang komunikasi dan informasi publik melalui Kegiatan Pelatihan Jurnalistik dan Pengelohan Media Sosial Pemerintah daerah bagi ASN dan Media Lokal tersebut. Maksud dari Kegiatan Pelatihan Jurnalistik dan pengelohan media sosial kemampuan ASN dalam hal meliput dan menulis berita dan informasi publik tentang program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Tujuan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik dan Pengelohan Media Sosial Pemerintah daerah adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ASN yang bertugas di bidang Komunikasi dan Informasi Publik. Rapat Koordinasi Teknis Kehumasan 14 Kota/Kab se-Kalbar melalui pelaksanaan 1 kali rapat koordinasi Kerjasama Pranata humas pemerintah daerah dalam menyebarluaskan kinerja dan capaian merupakan hal yang penting. Masyarakat mendapatkan informasi dari pemerintah secara langsung sehingga akan menimbulkan respon positif. Peran Pranata Humas sangat dibutuhkan untuk sinkronisasi penyebaran informasi dan sinergi antar instansi pemerintah dan lembaga dan partisipasi aktif dari seluruh anggota Pranata Humas dan dukungan masyarakat merupakan hal yang harus ditingkatkan. Oleh sebab itu, Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pranata humas Pemkab/Kota se-Kalbar dianggap sebagai wadah untuk menyampaikan *Informasi Publik atau Komunikasi Publik* dalam kaitannya dengan strategi kegiatan Pememerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk disampaikan kepada masyarakat luas dan Komunikasi Publik

**8) Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Keberadaan Komisi Informasi adalah salah satu amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi. Pada Tahun 2024 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan dana Hibah dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

**2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

**a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**

**1) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Nama domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 5 Tahun 2015 mengenai Registrar Nama Domain Instansi

Penyelenggara Negara, pada pasal 4, bahwa setiap instansi termasuk instansi pemerintah daerah wajib menggunakan dan mendaftarkan nama domain sebagai alamat elektronik resmi instansi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mendaftarkan nama domain yaitu *kalbarprov.go.id* setiap tahunnya agar domain yang dimiliki tetap aktif.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menyediakan layanan sub domain yang dibutuhkan instansi lain dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Layanan sub domain yang dimaksud berupa layanan website dan aplikasi yang membutuhkan domain *kalbarprov.go.id*, layanan surat elektronik (email) Pemprov Kalbar, layanan *cloud* (berbagi pakai), dan yang lainnya. Setiap tahunnya diharapkan semua permintaan layanan nama domain dan sub domain dapat tercapai sebesar 100% dimana semua permintaan dari instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat terpenuhi dan terlayani dengan baik.

## **2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Unit.

Pada tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab terhadap pengelolaan akses intranet dan internet/bandwidth di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

- a. Bandwidth Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan total kebutuhan 280 Mbps, yang terdiri dari:
  - Untuk mengakomodir akses internet pada Biro/Badan di lingkungan kantor Gubernur. Diperkirakan terdapat 700

pengguna di lingkungan Setda Prov. Kalbar dengan kebutuhan kecepatan rata – rata 1.2 Mbps/perangkat, maka dibutuhkan 840 Mbps.

- Sebagai akses server Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ditempatkan pada ruang Data Center Dinas Kominfo Prov. Kalbar yang berlokasi di Komplek Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak. Terdapat 32 server eksisting dengan kebutuhan kecepatan rata – rata 5 Mbps, sehingga dibutuhkan total 160 Mbps. Selain itu, akses server khusus Simakda yang memfasilitasi aplikasi penganggaran dan keuangan daerah, yaitu sebesar 45 Mbps. Oleh karena itu, total kebutuhan bandwidth Ruang Data Center Diskominfo Prov. Kalbar adalah sebesar 205 Mbps.
- b. Bandwidth Data Analytic Room (DAR) untuk mendukung ruangan yang sering digunakan oleh pimpinan dalam pengambilan kebijakan dan pertemuan virtual sebesar 100 Mbps.
- c. Untuk mendukung aktivitas 50 titik kantor/OPD/UPT di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat yang berada di kota Pontianak, Dinas Komunikasi dan Informatika mengalokasikan bandwidth sebesar 3 Gbps, sehingga masing-masing kantor/OPD/UPT mendapatkan minimal bandwidth sebesar 60 Mbps.

Layanan yang telah dilakukan selama ini perlu dilakukan peningkatan setiap tahunnya baik dari sisi teknologi yang digunakan maupun besaran kapasitas bandwidth. Peningkatan tersebut perlu dilakukan dengan pertimbangan semakin seringnya penggunaan berbagai aplikasi umum dan aplikasi khusus untuk menunjang pekerjaan Perangkat Daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik, pada tahun 2022, penyediaan akses internet di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sepenuhnya menjadi pekerjaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk penyediaan jaringan intra pemerintah maupun internet corporate dengan bekerja sama dengan internet service provider.

Diskominfo Prov. Kalbar juga tetap memelihara jaringan intranet eksisting. Jaringan intranet sudah terpasang pada 50 titik kantor/OPD/UPT di tahun 2023. Pada tahun 2024, pemeliharaan jaringan intranet telah dianggarkan dan akan dikerjakan bersama tim dari pihak swasta baik secara rutin maupun ketika terjadi kendala atau masalah. Selain itu, berbagai pengadaan perangkat jaringan mulai dari Access Point, Switch, Router, berbagai jenis kabel, dan lainnya untuk mendukung pengelolaan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tanggung jawab dalam bidang penyediaan dan pengelolaan bandwidth jaringan intranet dan internet dan pemeliharaan jaringan intranet eksisting Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maka diselenggarakan pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

**b. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**

**1) *Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi***

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 71 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, salah satu tupoksi Diskominfo Prov. Kalbar adalah dalam hal pengelolaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE). Beberapa layanan SPBE yang dikelola oleh Diskominfo antara lain adalah Pengelolaan Email, Pengelolaan Web Hosting, Pengelolaan presensi secara elektronik serta Pengelolaan Data Cloud (Cloud Storage).

Penggunaan email kedinasan sendiri telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat eMail Resmi Pemerintah pada Instansi Pemerintah. Bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi modern dengan komunikasi yang cepat, efektif dan efisien di lingkungan instansi pemerintah, serta mempertimbangkan aspek keamanan dan resiko kerahasiaan data dan informasi negara, seluruh pegawai/pejabat instansi pemerintah wajib menggunakan email resmi pemerintah sebagai alat komunikasi persuratan elektronik dalam kegiatan kedinasan sebagaimana diamanatkan dalam SE MENPAN Nomor 6 Tahun 2013. Terkait pemanfaatan email kedinasan sampai saat ini yang memanfaatkan layanan email disampaikan berjumlah 12.470 (dua belas ribu empat ratus tujuh puluh) akun yang diberikan kepada OPD dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu, untuk menunjang tugas Diskominfo khususnya dalam hal penerapan Aplikasi Informatika adalah dengan memberikan layanan Web Hosting dimana OPD dapat menyimpan source aplikasi/web dinas tanpa membayar dengan akses ke server yang tinggi dan tingkat keamanan yang baik

dengan jumlah layanan yang sudah difasilitasi berjumlah 427 website/aplikasi yang antara lain dipergunakan di :

- a. OPD di lingkungan Pemprov. Kalbar;
- b. Desa-desa di Kalimantan Barat; dan
- c. PPID Pemprov Kalimantan Barat.

Kemudian untuk membantu kemudahan ASN di lingkungan Pemprov. Kalbar, Diskominfo Prov. Kalbar juga telah menyediakan layanan tempat penyimpanan data secara maya yaitu datacloud yang berperan sebagai cloud storage yang sampai dengan saat ini sudah diberikan akun berjumlah :

- a. OPD di lingkungan Pemprov. Kalbar 46 (empat puluh enam) akun;
- b. Khusus Personal (ASN) 99 (sembilan puluh sembilan) akun;

Terkait space yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat untuk DataCloud adalah 4 (empat) TB dan yang sudah terpakai sebesar 2,2 TB. Terakhir, terkait dengan layanan presensi secara elektronik dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalimantan Barat telah menggunakan sistem e-presensi yang terdiri dari aplikasi presensi melalui website <http://presensi.kalbarprov.go.id> dan juga mesin presensi finger print yang telah dikoneksikan secara online sebanyak 126 unit mesin. Keempat layanan tersebut perlu dikelola dalam rangka memberi pelayanan yg optimal kepada OPD dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi.

**2) Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Tersedianya peraturan pedoman tata kelola SPBE Pemprov Kalbar sebanyak 1 Peraturan. Pedoman mengenai Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut berisi rencana induk penerapan TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Masterplan tersebut adalah berisi rencana secara umum. Untuk selanjutnya, diperlukan peraturan/pedoman turunan yang membahas lebih detail mengenai pengelolaan TIK di OPD Pemprov. Kalbar, diantaranya yang utama adalah pedoman standarisasi struktur data sebagai landasan pembuatan aplikasi yg terintegrasi dan satu data Kalimantan Barat.

Penyusunan Pedoman Tata Kelola SPBE Pemprov. Kalbar dimaksudkan untuk mendukung proses penerapan TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar tertib dan optimal. Mengakomodir proses penyusunan pedoman tata kelola SPBE Pemprov. Kalbar sebagai landasan implementasi TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang mengatur mengenai perencanaan dan manajemen TIK untuk diterapkan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar sesuai dengan arah kebijakan dan pembangunan. Selanjutnya berdampak pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang diimplementasikan pada semua lini dan aspek pemerintahan berbasis e-government.



**3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Unit.

Jumlah server yang dikelola di Pusat Data Pemprov Kalbar yaitu 32 unit server. Pusat Data / *Data Center* adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan untuk menempatkan sistem dan komponen-komponen server, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. *Data Center* juga berfungsi sebagai *principal repositories* untuk segala macam peralatan IT, termasuk server, subsistem penyimpanan, *networking switches*, *router* dan *firewall*, serta pemasangan kabel dan physical racks yang digunakan untuk mengatur dan menghubungkan peralatan IT. *Data Center* merupakan pusat penyimpanan dan pemrosesan data secara fisik dimana aplikasi menjalankan proses untuk dapat diakses oleh pengguna/users. Guna menjamin kelancaran akses pada aplikasi yang dijalankan atau data yang disimpan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya listrik yang tidak terganggu, keamanan ruang penyimpanan server, kecepatan pemrosesan dan penyimpanan data, akses internet yang memadai dan tanpa gangguan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab terhadap pengelolaan *data center* sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data-data di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. *Data Center* yang ada saat ini digunakan untuk media penyimpanan server, manajemen dan pengelolaan, hingga penyebaran data dan informasi. Server-server ini digunakan untuk mendukung layanan SPBE Pemprov. Kalbar diantaranya adalah layanan subdomain, *hosting web* dan aplikasi, data cloud/*cloud storage* pemprov, email serta layanan video conference dan melayani

aplikasi dan web dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Layanan-layanan tersebut membutuhkan tempat penyimpanan data yang aman, handal dan minim gangguan.

**4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, *virtual meeting* semakin banyak digunakan untuk mempertemukan orang-orang di berbagai lokasi sehingga dapat bertemu secara virtual dan melakukan kegiatan. *Virtual meeting* telah menjadi media yang semakin populer dan dapat diterima untuk mengembangkan dan menjangkau audiens yang lebih besar, pemerintah daerah khususnya Provinsi Kalimantan Barat telah menyadari bahwa mengadakan konferensi secara virtual jauh lebih murah daripada acara tatap muka.

*Virtual meeting* memungkinkan peserta dari jarak jauh untuk mengakses pertemuan dan acara langsung dari tempat masing-masing menggunakan computer atau perangkat lainnya, dapat diselenggarakan sepenuhnya melalui internet atau jaringan telpon dimana peserta tidak perlu berkumpul di ruangan fisik yang sama. Selain acara langsung, *virtual meeting* mencakup forum diskusi, pusat sumber konferensi, kemampuan untuk mencari dan mengobrol dengan peserta konferensi lainnya dan fitur lainnya. Semua ini dirancang khusus untuk memberikan kesempatan yang sama kepada peserta virtual untuk mendapatkan pengalaman rapat yang sama dengan peserta ditempat.

Dengan banyaknya *virtual meeting* yang telah diselenggarakan dengan baik dan sukses, membuat banyak pihak khususnya Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat percaya bahwa format ini akan terus dilakukan. Di masa mendatang meskipun pandemi telah berlalu, konsep *virtual meeting* akan tetap menjadi pilihan, karena mampu menghadirkan peserta dengan geografis yang lebih luas serta dengan biaya yang jauh lebih murah.

**5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik, dengan target yang ingin dicapai adalah 14 Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mempunyai program untuk pembangunan akses telekomunikasi pada daerah 3T. Setiap tahunnya, diperlukan data mengenai infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T yang mencakup usulan daerah yang akan dibutuhkan pembangunan akses telekomunikasi serta kondisi infrastruktur eksisting. Daftar lokasi pembangunan diusulkan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan memperkuat usulan ke Kementerian/Lembaga terkait. Data eksisting berupa kondisi keberadaan tower telekomunikasi serta status berfungsi atau tidaknya sarana dimaksud dengan menyertakan kendala serta permasalahan yang terjadi di lapangan.

Kegiatan Identifikasi sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai perkembangan

pemerataan pembangunan di bidang telekomunikasi yang di arahkan pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi yakni 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), daerah perbatasan, daerah rintisan dan daerah yang tidak layak secara ekonomis serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mendapatkan gambaran perkembangan pembangunan infrastruktur KPU USO di Kalimantan Barat. Mengatasi kesenjangan digital sehingga masyarakat daerah tertinggal, terpencil dan terluar dapat menikmati akses komunikasi dan telekomunikasi dengan mudah dan pemerataan pembangunan telekomunikasi di wilayah Kalimantan Barat.

**6) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan, dengan target yang ingin dicapai adalah 10 Unit.

Jumlah Aplikasi yang dibangun/dikembangkan adalah 10 aplikasi yaitu Pengembangan Aplikasi Dashboard Penduduk Miskin, Pengembangan Aplikasi Dashboard Pangan dan Peternakan, Pengembangan Aplikasi Dashboard Desa, Pengembangan Aplikasi Dashboard Kependudukan, Pengembangan Aplikasi Dashboard Pekerjaan Umum, Pengembangan Aplikasi Dashboard Keuangan, Pengembangan Aplikasi Kiosk, Pembuatan Aplikasi Layanan Aptika, Pengembangan Aplikasi SARIVA dan Pengembangan Aplikasi E-Activity.

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi dimaksudkan untuk mendukung pengembangan aplikasi

perkantoran atau pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi adalah untuk mengakomodir pembuatan aplikasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan memperbarui/mengembangkan portal web resmi/aplikasi berbasis web online Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang meliputi proses analisis kebutuhan, perancangan sistem dan *database*, serta pengkodean dan ujicoba aplikasi. Aplikasi yang akan dibangun dan dikembangkan antara lain dapat berupa portal web Pemprov, web OPD atau aplikasi pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun pelaksanaan pembuatan aplikasi tersebut adalah menggunakan jasa penyedia dengan metode pengadaan langsung.

**7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Layanan.

Pengelolaan sistem penghubung layanan elektronik pemerintah 1 sistem penghubung. Integrasi Sistem Informasi dimaksudkan untuk mendukung proses integrasi sistem informasi dalam rangka efisiensi proses bisnis dan meminimalisir duplikasi dan inkonsistensi data. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Integrasi Sistem Informasi adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengakomodir proses pengintegrasian sistem informasi yang melibatkan berbagai pihak dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

- b) Untuk mempersingkat alur birokrasi dan proses bisnis terutama dalam hal pelayanan publik dan administrasi perkantoran dengan sistem berbagi pakai data/informasi.

Sejalan dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), SPLP ini juga berfungsi sebagai penyedia fasilitas layanan sistem penghubung yang dapat dipergunakan untuk melakukan manajemen API dan interoperabilitas data antar aplikasi. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan koordinasi yang kuat antara stakeholder SPBE dan SDI.

**8) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

*Command center* merupakan salah satu fasilitas dengan infrastruktur lengkap yang disiapkan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berada disebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, dimana seorang gubernur selaku Kepala Daerah bersama-sama tim melakukan meeting, membahas pengambilan keputusan, menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh Tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat antara lain: tindakan tanggap darurat, action plan untuk perbaikan dan pemulihan, langkah pengadaan dan langkah penyediaan informasi publik.

Tujuan dari *command center* adalah mengumpulkan dan memproses informasi yang dibutuhkan agar dapat manage

atau mengatur berbagai kejadian dan kesadaran situasional secara cepat dan efektif serta dokumentasi yang bertujuan sebagai amunisi payung hukum dan cost-recovery. Berbagai dokumentasi mengenai informasi yang diterima dan responnya digunakan sebagai :

- a) Perencanaan;
- b) Aksi tanggap;
- c) Penggunaan sumberdaya;
- d) Timeline aktivitas;
- e) Catatan pembiayaan operasional;
- f) Penugasan staf penanganan peristiwa/kejadian; dan
- g) Catatan detail peristiwa/kejadian.

**9) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Guna mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat perlu menyelenggarakan Workshop dan Sosialisasi terkait implementasi SPBE di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang targetnya adalah terselenggaranya kegiatan pemerintah yang terbuka, partisipatif, inovatif, kolaboratif dan dapat diukur dengan jelas.

Kegiatan workshop dan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman dan terus belajar serta terlibat secara aktif dalam mengimplementasikan SPBE dalam kegiatan pemerintahan,

karena ini merupakan potret pemerintahan seberapa jauh kinerja pemerintah, dari workshop dan sosialisasi ini diharapkan dapat mengukur seberapa jauh implementasi SPBE serta kekuatannya sehingga pemerintah provinsi Kalimantan barat juga dapat mengambil Langkah strategis untuk memperbaikinya.

**10) Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, Kementerian PAN & RB selaku pemangku kebijakan dalam penerapan SPBE, melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Nilai Indeks SPBE tersebut juga digunakan oleh Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat sebagai acuan target Rencana Strategis (Renstra). Dalam proses pemenuhan nilai indeks SPBE, dibutuhkan informasi perkembangan, penggunaan dan tata kelola TIK di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan untuk mengakomodir identifikasi pelaksanaan SPBE yang melibatkan seluruh OPD serta forum penerapan SPBE melalui Tim Koordinasi SPBE dan Forum Kolaborasi SPBE Pemprov Kalbar. Melanjutkan kegiatan tahun 2023, perlunya sosialisasi



Arsitektur SPBE Pemprov Kalbar serta penyusunan Peta Rencana SPBE Pemprov Kalbar. Semua kegiatan tersebut ditampung dalam Rencana Kerja Tahun 2024 pada kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO). Tujuan kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Daerah berfungsi untuk menjamin:

1. Keterpaduan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pemantauan dan evaluasi SPBE yang diselenggarakan setiap tahunnya;
3. Pelaksanaan dan pengimplementasian kebijakan, manajemen, tata kelola hingga layanan SPBE;

### **3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

#### **a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**

##### **1) *Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral***

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen sesuai Pemandagri Nomor 90 Tahun 2019.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral merupakan sub kegiatan gabungan dari mulai koordinasi, pengumpulan, pengelolaan, analisis sampai mendiseminasikan data/informasi baik kedalam Portal Satu Data maupun Media Publikasi lainnya, *sesuai Pepres No. 39 Tahun 2019. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, melaksanakan kegiatan sebagai berikut :*

- a) Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Sektoral  
Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Sektoral bertujuan mulai perencanaan pengumpulan data dari OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota, dalam hal mengumpulkan data statistik sektoral dengan menginput dataset ke dalam Portal Satu Data Kalbar.
- b) Kegiatan Analisis Data Statistik Sektoral  
Kegiatan Analisis Data Statistik Sektoral bertujuan untuk mengetahui hasil analisis data sektoral yang terhimpun di Portal Satu Data Kalbar dengan menganalisis perbandingan data secara *continue* secara terus menerus selama tiga (3) tahun terakhir yang pada akhirnya didiseminasikan sebagai bahan data/informasi.
- c) Kegiatan Evaluasi Data Statistik Sektoral  
Kegiatan Evaluasi Data Statistik Sektoral bertujuan mengevaluasi dari kinerja OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota dalam hal menyampaikan datasetnya ke portal satu data Kalbar yang diproduksi dari OPD dan Diskominfo Kab/Kota, dengan memberikan apresiasi bagi OPD yang datasetnya terbanyak dan mendorong OPD yang datasetnya minim (kurang).
- d) Cetak Buku Kalimantan Barat Dalam Angka  
Pencetakan Buku Kalimantan Barat Dalam Angka 2024 merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat. Publikasi ini memuat data/informasi statistik tentang hasil-hasil pembangunan di wilayah Kalimantan Barat selama tahun 2023.  
Data yang disajikan dalam publikasi terdiri dari data sekunder yang bersumber dari berbagai

instansi/dinas/lembaga pemerintah, dan data primer hasil sensus/survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.

e) **Penyusunan Buku Statistik Sektoral Kalimantan Barat**

Penyusunan Buku Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2024, merupakan pelaksanaan amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah non pelayanan dasar di bidang Statistik Sektoral.

Buku ini menyajikan data/informasi statistik sektoral yang dikumpulkan pada tahun 2023, yang diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi perangkat daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat lainnya baik sebagai penyelenggara maupun pemakai data statistik.

Untuk hal tersebut di atas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagai Walidata bekerja sama dengan praktisi ahli di bidang statistik menyusun Buku Statistik Sektoral Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2024.

**2) Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen, sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral merupakan pelaksanaan amanah Perpres Nomor 39 Tahun 2019, dimana data-data disampaikan/diproduksi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk disusun standar data, jenis data dan metadatanya. Dengan tujuan untuk menyusun informasi dalam

bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data dan menjelaskan tentang data.

a) Kegiatan Menghimpun Jumlah Metadata Statistik Sektoral  
Kegiatan Menghimpun Jumlah Metadata Statistik Sektoral merupakan kegiatan dalam rangka penyusunan Buku Metadata Statistik Sektoral, karena setiap data harus mempunyai metadata. Dalam kegiatan ini, seluruh OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar akan membuat metadata yang nantinya akan dihimpun dan disusun menjadi Buku Metadata Statistik Sektoral.

b) Penyusunan Buku Metadata Statistik Sektoral  
Penyusunan Buku Metadata Statistik Sektoral 2024, merupakan pelaksanaan amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah non pelayanan dasar di bidang Statistik Sektoral.

Buku ini menyajikan ringkasan metadata statistik sektoral yang dikumpulkan pada Tahun 2023 yang diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi perangkat daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat lainnya baik sebagai penyelenggara maupun pemakai data statistik.

Untuk hal tersebut di atas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagai Walidata bekerja sama dengan praktisi ahli di bidang statistik menyusun Buku Metadata Statistik Sektoral 2024 yang menyajikan ringkasan metadata statistik sektoral, yang diharapkan dapat menjembatani terbatasnya ketersediaan metadata yang terstandar serta dapat menjadi acuan bagi para penyelenggara statistik sektoral dan masyarakat pengguna lainnya, antara lain dalam hal :

- Penyelenggaraan kegiatan statistik sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Sebagai bahan rujukan dalam integrasi dan dokumentasi data dan informasi statistik sektoral;
- Identifikasi kegiatan statistik yang diperlukan, untuk kemudahan penelusuran, perolehan, analisis maupun evaluasi data.

### **3) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS, dengan target yang ingin dicapai adalah 90 Orang, sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Tujuan dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral ini adalah :

- a) Statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan analisis sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antara unsur dan penyelenggaraan statistik.
- b) Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- c) Memberikan pemahaman kepada Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menyamakan persepsi terkait penyelenggaraan Statistik Sektoral yang ada di daerah.

- d) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Data Statistik Sektoral yang dihasilkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Produsen Data di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

#### **4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

##### **a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**

##### **1) *Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi***

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Dokumen.

Dalam penyelenggaraan urusan Persandian dan Keamanan Informasi diperlukan adanya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah. Dengan ini direncanakan 3 (Tiga) Produk Hukum Daerah di Bidang Persandian, yaitu Peraturan Gubernur tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Elektronik, Keputusan Gubernur tentang Pola Jaring Komunikasi Sandi, dan Keputusan Gubernur tentang Standar Teknis Keamanan Aplikasi. Selain itu juga perlu membuat Standar Operasional Prosedur dan Petunjuk Teknis/Pedoman Penyelenggaraan Persandian pada Pengamanan Sistem elektronik, sebagai payung hukum penyelenggaraan urusan Persandian dan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

**2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Laporan.

Pada prinsipnya, Sumber Daya Keamanan Informasi meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu :

a) Sumber Daya Manusia

Analisis terhadap sumber daya manusia, terkait kesesuaian tuntutan kebutuhan tupoksi dengan skill dan pengalaman yang dimiliki, *basic* pendidikan, motivasi, dan kemampuan berkomunikasi, serta kinerja kerja, terkait urusan Persandian untuk Pengamanan Informatika.

b) Alat yang Digunakan

Analisis alat yang digunakan, dalam artian kesesuaian kebutuhan dengan ketersediaan alat secara komprehensif, (seperti software, *hardware*, LAN, WAN, dan infrastruktur Teknologi Informatika).

Hal ini akan menjadi parameter bagi pengambil keputusan, mengenai spesifik kebutuhan alat yang harus diprioritaskan ketersediaannya.

c) Proses

Analisis proses dilakukan agar terjadi keselarasan pada tata kelola keamanan SPBE, dan Standart Prosedur Operasional kegiatan Pengamanan SPBE, sehingga keamanan SPBE memungkinkan untuk dimaksimalkan, agar SPBE yang transparan, komprehensif, aman dan akuntabel segera terwujud.

Terdapat Pengisian secara mandiri Indeks Keamanan Informasi dengan Dinas Komunikasi dan

Informatika menjadi pusatnya untuk mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang nantinya akan di Audit oleh Badan Siber dan Sandi Negara setiap Tahunnya. Penyusunan Profil Risiko Kamsiber juga menjadi kegiatan setiap tahunnya untuk menunjang Pengelolaan manajemen risiko kamsiber di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

**3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan target yang ingin dicapai adalah 1 Laporan.

Adapun pada sub kegiatan ini, melaksanakan pembinaan literasi keamanan dalam menerima/mengirim informasi melalui media elektronik maupun non elektronik bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Kabupaten/Kota se-Kalbar.

Pembinaan literasi keamanan SPBE ini mengacu pada beberapa instrumen yang direkomendasikan oleh Badan Sandi dan Siber Negara atau BSSN, sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu dilaksanakan juga, sterilisasi tempat strategis sebagai bentuk pengamanan/pencegahan dugaan penyadapan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, agar keamanan informasi yang dimaksud terjamin valid, utuh dan kerahasiaannya.

Terselenggaranya Kerjasama dengan BSrE Dalam Penerbitan Tanda Tangan Digital di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Definisi Tanda Tangan Elektronik menurut UU ITE dan PP adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait



dengan Informasi Elektronik lainnya sebagai alat verifikasi dan autentikasi atas id digital, keutuhan dan keaslian. Landasan Hukum TTE yang tertuang dalam UU ITE Pasal 11 yaitu Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. UU ITE Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya. Layanan Tanda Tangan Elektronik / Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat merupakan menjadi kegiatan yang mendukung Pengamanan Dokumen secara Elektronik yang sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah.

**4) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi, dengan target yang ingin dicapai adalah 38 Perangkat Daerah.

a) Terbentuk dan beroperasinya Tim CSIRT.

Bidang Persandian dan Statistik Memiliki Tugas untuk Mengelola Insiden Keamanan Informasi / Siber di dalam wadah layanan Kalbarprov-CSIRT (Tim Tanggap Insiden Siber Provinsi Kalimantan Barat). Insiden Keamanan Informasi adalah setiap kejadian yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem komputer, seperti serangan virus, akses illegal, kebocoran informasi, serangan DDOS, dan lain sebagainya. *CSIRT (Computer Security Incident Response Team)* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SOC atau *Security Operation Center*, yang telah

dibentuk pada tahun 2020, dan Kalbarprov-CSIRT telah dibentuk pada Tahun 2023

CSIRT adalah sebuah Tim yang dibentuk untuk merespon insiden keamanan informasi yang terjadi pada konstituennya. Tujuan utama dari respon / tanggapan terhadap insiden adalah untuk meminimalisir insiden agar tidak menyebar serta agar sistem yang terinfeksi dapat beroperasi secara normal. Latar belakang terbentuknya CSIRT adalah banyaknya insiden (spam, malware, deface, phishing) terhadap aset TIK instansi pemerintah. Tujuannya untuk mengamankan dan meminimalisir insiden keamanan informasi di jajaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

- b) Terlaksananya penyelenggaraan Dukungan Persandian Untuk Informasi Daerah.

Dalam rangka membangun kesamaan pemahaman terhadap penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Daerah perlu untuk meningkatkan kesadaran pengamanan Informasi milik Pemerintah serta membangun kesamaan pemahaman tentang *Security awareness* melalui Literasi Budaya Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Meningkatkan layanan Persandian dan keamanan Informasi, berupa inventarisasi data atau informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal dalam Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi dapat diidentifikasi bahwa tugas dan fungsi serta kewenangan persandian meliputi penyelenggaraan keamanan informasi rahasia pada transmisi (*informasi security*) dan penyelenggaraan intelijen

sinyal (*signal intelligent*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**

**1) Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi**

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi, dengan target yang ingin dicapai adalah 38 Perangkat Daerah.

a) Penggunaan Layanan email dan Persandian/ Sanapati Perangkat Daerah dengan target 38 email sanapati OPD

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi dan terbentuknya Jaringan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Perlunya meningkatkan pengamanan informasi khususnya dalam sarana komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, salah satunya dengan email Sanapati yang merupakan layanan email milik BSSN yang bersifat secure closed group (tertutup) yang memiliki proteksi terhadap fake email, spam email, dan email bombing.

b) Perangkat layanan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah yang tersedia dan beroperasi yaitu 1 Perangkat JKS Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Sandi, penyelenggaraan operasional Sistem Persandian Negara perlu dibangun Jaring Komunikasi Sandi sebagai sarana utama yang digunakan dalam kegiatan komunikasi Persandian di lingkungan Instansi Pemerintah.

Jaring Komunikasi Sandi (JKS) memiliki keterhubungan antar Pengguna Persandian melalui jaringan telekomunikasi. Pengguna Persandian adalah pejabat pada Instansi Pemerintah yang memanfaatkan Persandian. Gelar Jaring Komunikasi Sandi adalah kegiatan membangun JKS yang dimulai dari kegiatan perencanaan, implementasi dan evaluasi.

- c) Terlaksananya Pembinaan dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Persandian/ Sanapati Perangkat Daerah.
- d) Beroperasinya Topologi Jaring Komunikasi Sandi Komunikasi antara Gubernur dengan Kepala Perangkat Daerah, Gubernur dengan Bupati/ Walikota, Para Kepala Perangkat Daerah, dan Agen JKS di tiap Perangkat Daerah sebagai penerima Informasi yang bersifat terbatas.
- e) Optimalisasi Jaring Komunikasi Sandi melalui pemanfaatan AKCAYAS (Aplikasi Chat Secure), yang dikembangkan dan dikonfigureasi secara privat untuk menjamin keamanan, Ketersediaan, dan keberlangsungan komunikasi secara aman dan terkendali. Aplikasi ini merupakan aplikasi chat mirip Whatsapp / Telegram hanya Servernya ada di lokal / Datacenter jadi semua transaksi data dikelola pada server mandiri dan tertutup jadi lebih terjamin keamannya.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### A. INDIKATOR KINERJA

Adapun indikator kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

**TABEL : 4.1**  
**Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
<b>Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>persentase OPD dengan zona hijau / nilai 85 - 100</b>	<b>95,35%</b>
	Persentase media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD	85,17%
<b>Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Pemerintah Kabupaten/ Kota dan OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar yang membentuk PPID dan menyelenggarakan pelayanan informasi publik</b>	<b>100%</b>
	Jumlah isu dan opini publik yang diakomodir	420 Opini
	Jumlah KI Kalbar yang menerima Hibah	1 Komisi
	persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Kalimantan Barat yang dibina	65%
	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD	5 Media
<b>Sub Kegiatan : Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</b>	<b>5 Dokumen</b>
<b>Sub Kegiatan : Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</b>	<b>1 Dokumen</b>
<b>Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</b>	<b>1 Dokumen</b>

<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	13 Dokumen
Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan
Sub Kegiatan : Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen
Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	250 orang
Sub Kegiatan : Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen
<b>Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>Persentase total bobot domain evaluasi SPBE</b>	<b>70,8%</b>
Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%
Kegiatan : Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan e-government diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%
Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit
Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan : Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	14 Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	10 Unit
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan
Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen
Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen
Sub Kegiatan : Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen
<b>Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Persentase OPD yang telah mengintegrasikan data statistik sektoral</b>	<b>79%</b>

<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi	100%
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen
Sub Kegiatan : Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	104 Orang
<b>Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Status Kesiapan Keamanan Informasi : - Baik - Cukup Baik -Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar – Tidak Layak</b>	<b>70%</b>
Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	100%
Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian	100%
Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan
Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	38 Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	38 Perangkat Daerah

## B. Kelompok Sasaran

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Sasaran dan Lokasi sebagai berikut :

**TABEL : 4.2**  
**Kegiatan Program Prioritas Tahun 2024**  
**Berdasarkan Sasaran dan Lokasi Kegiatan**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran	Lokasi
<b>Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	persentase OPD dengan zona hijau / nilai 85 - 100		
	Persentase media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD		
Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemerintah Kabupaten/ Kota dan OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar yang membentuk PPID dan menyelenggarakan pelayanan informasi publik		
	Jumlah isu dan opini publik yang diakomodir		

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR

<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Lokasi</b>
	Jumlah KI Kalbar yang menerima Hibah		
	persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Kalimantan Barat yang dibina		
	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD		
Sub Kegiatan : Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Masyarakat	Pontianak
Sub Kegiatan : Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Masyarakat	Pontianak
Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Masyarakat	Pontianak
Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	OPD Pemprov Kalbar dan PPID Kab/Kota, Masyarakat, Badan Publik	Pontianak, Kalimantan Barat
Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Masyarakat dan Media	Pontianak
Sub Kegiatan : Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Masyarakat	Pontianak
Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Masyarakat	Pontianak
Sub Kegiatan : Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Komisi Informasi Prov. Kalbar	Pontianak

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR

<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Lokasi</b>
<b>Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	Persentase total bobot domain evaluasi SPBE		
Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		
Kegiatan : Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan e-government diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR

<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Lokasi</b>
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Masyarakat	Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
<b>Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	Persentase OPD yang telah Mengintegrasikan Data Statistik Sektoral		

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALBAR

<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Lokasi</b>
Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi		
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
<b>Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	Status Kesiapan Keamanan Informasi : -Baik - Cukup Baik -Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar – Tidak Layak		
Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah		
Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian		

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran	Lokasi
Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak

### C. KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF

Adapun kebutuhan pendanaan indikatif dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 28.544.711.874,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) (rincian pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terdapat pada lampiran).

**D. SUMBER DANA**

Sumber pendanaan yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024.

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan dalam periode 1 (satu) tahun yang memuat arah kebijakan pelaksanaan pembangunan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan dan juga sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dan tolak ukur capaian kinerja Tahun 2024 dalam mewujudkan target-target kinerja yang telah ditetapkan dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, keberhasilan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat akan menunjang keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan cepat melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pelayanan Informasi dan Publikasi.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 masih jauh dari kata “sempurna” diharapkan berbagai kritik dan saran bagi perbaikan perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat guna mencapai peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi.

Pontianak, Juli 2023

Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Barat,



D. Zamroni, S.STP, M.Si  
Rebina Tingkat I

NIP. 19800307 199810 1 001



# LAMPIRAN I

## TABEL

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2024**

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>						<b>28.544.711.874,00</b>							<b>0,00</b>		
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>28.544.711.874,00</b>							<b>0,00</b>		
	<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						<b>27.743.388.774,00</b>							<b>0,00</b>		
1.	<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)</i>	-			<b>70 Nilai</b>	<b>11.296.962.774,00</b>						-	<b>0,00</b>		
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			100 Persen	428.314.490,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	177.990.290,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	19.111.800,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	2.16.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	20.412.400,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	19.000.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	44.000.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	127.800.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	8.294.326.824,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/ Bulan	7.944.714.524,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	5.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	277.200.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokumen	9.940.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	12.292.300,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				6 Laporan	45.180.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	-			100 %	11.787.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	11.787.500,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			100 %	131.464.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	43.814.200,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	9.200.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	15.200.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				54 Orang	39.270.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				54 Orang	23.980.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 %	370.202.695,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	23.239.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	44.224.600,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	7.059.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	63.960.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	19.999.800,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	6.400.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	19.824.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	176.696.295,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	8.800.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	259.935.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	259.935.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	1.542.406.065,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.105.605,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	9.900.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.531.400.460,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	258.526.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	41.750.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	83.040.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				170 Unit	133.736.000,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<i>Persentase OPD dengan zona hijau/nilai 85-100 Persentase Media Komunikasi Publik yang dikelola oleh OPD</i>	-			95.35 % 85.17 %	4.352.297.000,00						-	0,00	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Isu dan Opini Publik yang diakomodir Jumlah KI Kalbar yang Menerima Hibah Jumlah Media komunikasi Publik yang dikelola oleh OPD Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Kalimantan Barat yang dibina Persentase Pemerintah Kabupaten/ Kota dan OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar yang membentuk PPID dan menyelenggarakan pelayanan informasi publik	-			420 Opini 1 Komisi 5 Media 65 % 100 %	4.352.297.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				5 Dokumen	186.499.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1.220.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				13 Dokumen	361.798.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Layanan Hubungan Media</i>				3 Layanan	174.082.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan														
			<i>Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</i>				1 Dokumen	1.090.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik														
			<i>Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				250 Orang	119.918.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah</i>				1 Dokumen	1.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3.	<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Total Bobot Domain Evaluasi SPBE</b>	-			<b>70.8 %</b>	<b>12.094.129.000,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	<i>Persentase pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>	-			100 %	8.014.894.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.03.1.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>				1 Dokumen	72.700.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>				1 Unit	7.942.194.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	<i>Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>	-			100 %	4.079.234.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>				1 Dokumen	57.795.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.03.1.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>				1 Dokumen	30.557.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah														
			<i>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola</i>				1 Unit	2.029.001.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.03.1.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	79.087.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.03.1.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik</i>				14 Perangkat Daerah	57.800.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik														
			<i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i>				10 Unit	925.200.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.03.1.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah														
			<i>Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah</i>				1 Layanan	24.047.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.03.1.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas														
			<i>Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City</i>				1 Dokumen	737.745.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	75.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.16.03.1.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)</i>				1 Dokumen	63.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>						<b>404.360.200,00</b>							<b>0,00</b>	
1.	<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b><i>Persentase OPD yang telah Mengintegrasikan Data Statistik Sektoral</i></b>	-			<b>79 %</b>	<b>404.360.200,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	<i>Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi</i>	-			100 %	404.360.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>				1 Dokumen	263.337.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral														
			<i>Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun</i>				1 Dokumen	63.258.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.20.02.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS</i>				104 Orang	77.764.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>						<b>396.962.900,00</b>							<b>0,00</b>	
1.	<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Status Kesiapan Keamanan Informasi : - Baik - Cukup Baik - Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar - Tidak Layak</b>	-			<b>70 %</b>	<b>396.962.900,00</b>						-	<b>0,00</b>	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	<i>Persentase Pengelolaan Keamanan Informasi Perangkat Daerah</i>	-			100 %	356.271.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan</i>				1 Dokumen	30.153.900,00	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</i>				1 Laporan	46.931.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>				1 Laporan	74.009.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i>				38 Perangkat Daerah	205.176.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	<i>Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Persandian</i>	-			100 %	40.691.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi</i>				38 Perangkat Daerah	40.691.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat transformasi pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
		<b>J U M L A H</b>							<b>28.544.711.874,00</b>						<b>0,00</b>	

# **LAMPIRAN II**

## **TABEL**

### **CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PROGRAM							KEGIATAN					SUB KEGIATAN										Penanggung jawab										
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Catatan	Target												
			Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir					2024	Rp.		2025	Rp.	2026	Rp.						
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	1. Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik perangkat daerah	persentase OPD dengan zona hijau / nilai 85 - 100	90,91% (39 Zona Hijau dari 43 OPD)	95,35%	97,67%	100%	100%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya pengelolaan pelayanan Informasi dan pembinaan PPIID Pembantu di lingkungan Pemprov Kalbar dan PPIID Kabupaten/ Kota	Persentase Pemerintah Kabupaten/ Kota dan OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar yang membentuk PPIID dan menyelenggarakan pelayanan Informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	Perumusan Kebijakan dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Terapan Kebijakan dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan dan Komunikasi Publik		NA	NA	1 Dokumen	Rp. 75.000.000	1 Dokumen	NA							
																Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Penambahan Kegiatan Raker PPIID dan Uji Konsekumasi	13 Dokumen	Rp. 540.000.000	13 Dokumen	Rp. 567.000.000	15 Dokumen	Rp. 845.350.000	1) Seksi Pelayanan Informasi Publik 2) Seksi Pelayanan Informasi Publik 3) Seksi Pengelolaan Informasi Publik 4) - 5) - 6) Seksi Pelayanan Informasi Publik						
																Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Penambahan sarana dan prasarana podcast tahun 2024	6 Unit	Rp. 150.000.000	4 Unit	Rp. 130.000.000	6 Unit	Rp. 200.000.000	Seksi Pelayanan Informasi Publik						
																Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		5 Dokumen	Rp. 350.000.000	5 Dokumen	Rp. 397.500.000	5 Dokumen	Rp. 447.375.000	Seksi Pengkajian Opini dan Aspirasi Publik						
															Tersedianya Biaya Operasional Komisi Informasi Provinsi	Jumlah KI Kalbar yang menerima Hibah	1 Komisi	1 Komisi	1 Komisi	1 Komisi	1 Komisi	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		1 Dokumen	Rp. 1.000.000.000	1 Dokumen	Rp. 1.000.000.000	1 Dokumen	Rp. 1.000.000.000	Seksi Pelayanan Informasi Publik
															Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Kalimantan Barat yang dibina	51%	65%	75%	100%	100%	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Hasil Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Subkegiatan 08 dipindah ke bid KP, sementara subkegiatan 012 dihapus dan ditambah dengan anggarannya KIM	1 Dokumen	Rp. 1.094.500.000	3 Dokumen	Rp. 1.349.225.000	1 Dokumen	Rp. 1.104.186.250	Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
															Terselenggaranya Pengelolaan media komunikasi publik oleh OPD	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		1 Dokumen	Rp. 210.000.000	1 Dokumen	Rp. 220.500.000	1 Dokumen	Rp. 231.525.000	Seksi Pengelolaan Media komunikasi Publik
															Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		1 Dokumen	Rp. 1.378.125.000	1 Dokumen	Rp. 1.447.031.250	1 Dokumen	Rp. 1.519.382.813	Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik							
															Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya		300 Orang	Rp. 125.913.900	350 Orang	Rp. 132.209.595	400 Orang	Rp. 138.820.075	Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik							
															Layanan Hubungan Media	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media		3 Layanan	Rp. 182.786.100	3 Layanan	Rp. 191.925.405	3 Layanan	Rp. 201.521.675	Seksi Layanan Hubungan Media							
<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Terselenggaranya implementasi tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang optimal	persentase total load domain evaluasi SPBE	68,4% (=-3,42/5 "100) Baik	70,80% (=-3,54/5 "100) Sangat Baik	72,60% (=-3,63/5 "100) Sangat Baik	73,40% (=-3,67/5 "100) Sangat Baik	73,40% (=-3,67/5 "100) Sangat Baik	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		1 Dokumen	Rp. 113.400.000	1 Dokumen	Rp. 119.070.000	1 Dokumen	Rp. 125.023.500	Seksi Tata Kelola SPBE						
															Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		1 Unit	Rp. 8.199.450.000	1 Unit	Rp. 8.609.422.500	1 unit	Rp. 9.039.893.625	Seksi Infrastruktur TIK							
															Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Seksi Tata Kelola SPBE					



PROGRAM							KEGIATAN					SUB KEGIATAN										Penanggung Jawab				
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Catatan	Target						
			Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir					2024	Rp.		2025	Rp.	2026	Rp.
							Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		4 Dokumen : Hosting, Email, Subdomain, Datacloud		Rp. 72.450.000	4 Dokumen : Hosting, Email, Subdomain, Datacloud	Rp. 76.072.500	4 Dokumen : Hosting, Email, Subdomain, Datacloud	Rp. 79.876.125	Seksi Tata Kelola SPBE
														Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		1 Dokumen	Rp. 45.150.000	1 Dokumen	Rp. 47.407.500	1 Dokumen	Rp. 49.777.875	Seksi Tata Kelola SPBE		
														Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		1 Dokumen	Rp. 49.350.000	1 Dokumen	Rp. 51.817.500	1 Dokumen	Rp. 54.408.375	Seksi Tata Kelola SPBE		
														Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		1 Dokumen	Rp. 87.150.000	1 Dokumen	Rp. 91.507.500	1 Dokumen	Rp. 96.082.875	Seksi Tata Kelola SPBE		
														Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		1 Unit	Rp. 1.995.000.000	1 Unit	Rp. 2.094.750.000	1 unit	Rp. 2.199.487.500	Seksi Infrastruktur TIK		
														Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		10 Unit	Rp. 997.500.000	10 Unit	Rp. 1.047.375.000	10 Unit	Rp. 1.099.743.750	Seksi Aplikasi		
														Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		1 Layanan	Rp. 42.000.000	1 Layanan	Rp. 44.100.000	1 Layanan	Rp. 46.305.000	Seksi Aplikasi		
														Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City		1 Dokumen	Rp. 777.000.000	1 Dokumen	Rp. 815.850.000	1 Dokumen	Rp. 856.642.500	Seksi Tata Kelola SPBE		
														Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Seksi Infrastruktur TIK	
														Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Seksi Tata Kelola SPBE	
														Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		1 Dokumen	Rp. 123.900.000	1 Dokumen	Rp. 130.095.000	1 Dokumen	Rp. 136.599.750	Seksi Aplikasi		
														Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerangkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		14 Data Kabupaten/Kota	Rp. 47.250.000	14 Data Kabupaten/Kota	Rp. 49.612.500	14 Data Kabupaten/Kota	Rp. 52.093.125	Seksi Infrastruktur TIK		

PROGRAM							KEGIATAN					SUB KEGIATAN										Penanggung Jawab											
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Catatan	Target													
			Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir					2024	Rp.		2025	Rp.	2026	Rp.							
PROGRAM <b>PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan integrasi data statistik sektoral Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang telah mengintegrasikan Data Statistik Sektoral	75%	79%	85%	100%	100%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terselenggaranya penggunaan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang optimal	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang optimal	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		1	Dokumen	Rp.	236.250.000	1	Dokumen	Rp.	248.062.500	1	Dokumen	Rp.	260.465.625	1) Seksi Pengelolaan Data Statistik 2) Seksi Analisis Data Statistik 3) Seksi Pengelolaan Data Statistik 4) Seksi Analisis Data Statistik 5) Seksi Pengelolaan Data Statistik	
															Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral yang di himpun	Jumlah Metadata Statistik Sektoral		1	Dokumen	Rp.	97.650.000	1	Dokumen	Rp.	102.532.500	1	Dokumen	Rp.	107.659.125	Seksi Analisis Data Statistik		
															Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dan BPS		90	Orang	Rp.	90.678.210	90	Orang	Rp.	95.212.121	90	Orang	Rp.	99.972.727	Seksi Analisis Data Statistik		
															Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun		1	Dokumen	Rp.	91.350.000	1	Dokumen	Rp.	95.917.500	1	Dokumen	Rp.	100.713.375	Seksi Pengelolaan Data Statistik		
															Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		104	Orang	Rp.	98.057.976	104	Orang	Rp.	102.960.875	104	orang	Rp.	108.108.919	Seksi Pengelolaan Data Statistik		
															Pengembangan Infrastruktur	Berkembangnya Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik		1	Unit	Rp.	105.000.000	1	Unit	Rp.	110.250.000	1	Unit	Rp.	115.762.500	Seksi Analisis Data Statistik		
PROGRAM <b>PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAAN INFORMASI</b>	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan Informasi	Status Keselapan Keamanan Informasi - Baik - Cukup Baik - Memenuhi Kerangka Kerja Dasar Tidak Layak	Memenuh n Kerangka Kerja Dasar 55.5%	Memenuh n Kerangka Kerja Dasar 70%	Memenuh n Kerangka Kerja Dasar 80%	Baik 91%	Baik 91%	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi di OPD	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		1	Laporan	Rp.	115.500.000	1	Laporan	Rp.	121.275.000	1	Laporan	Rp.	127.338.750	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	
															Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		38	Perangkat Daerah	Rp.	302.591.762	38	Perangkat Daerah	Rp.	317.721.350	38	Perangkat Daerah	Rp.	333.607.417	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi		
															Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Ditetapkan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan		1	Dokumen	Rp.	78.750.000	1	Dokumen	Rp.	82.687.500	1	Dokumen	Rp.	86.821.875	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi		
																			Literasi Budaya Keamanan Siber		1	Dokumen	Rp.	-	1	Dokumen	Rp.	-	1	Dokumen	Rp.	-	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
																Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		1	Laporan	Rp.	78.750.000	1	Laporan	Rp.	82.687.500	1	Laporan	Rp.	86.821.875	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	
																Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan Layanan Persandian	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

PROGRAM							KEGIATAN										SUB KEGIATAN										Penanggung Jawab		
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Catatan	Target									
			Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir					2024	Rp.	2025	Rp.	2026	Rp.				
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Terselenggaranya urusan Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemprov. Kalbar	1. Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusun dan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen dan 12 Laporan	Rp.	205.737.263	7 Dokumen dan 12 Laporan	Rp.	216.024.126	8 Dokumen	Rp.	226.825.332	Kasubbag Renja dan Monev
																Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	Rp.	20.067.429	1 Dokumen	Rp.	21.070.800	1 Dokumen	Rp.	22.124.340	Kasubbag Renja dan Monev
																Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	Rp.	20.067.429	1 Dokumen	Rp.	21.070.800	1 Dokumen	Rp.	22.124.340	Kasubbag Renja dan Monev
																Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	Rp.	34.650.000	1 Dokumen	Rp.	36.382.500	1 Dokumen	Rp.	38.201.625	Kasubbag Renja dan Monev
																Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	Rp.	34.650.000	1 Dokumen	Rp.	36.382.500	1 Dokumen	Rp.	38.201.625	Kasubbag Renja dan Monev
																Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	Rp.	51.172.622	3 Laporan	Rp.	53.731.253	3 Laporan	Rp.	56.417.815	Kasubbag Renja dan Monev
																Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 laporan	Rp.	262.568.229	5 laporan	Rp.	275.696.640	5 laporan	Rp.	289.481.472	Kasubbag Renja dan Monev
		2 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		55 ASN	Rp.	8.023.817.975	55 ASN	Rp.	8.425.008.874	55 ASN	Rp.	8.846.259.317	Kasubbag Keuangan dan Aset
																Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	Rp.	5.250.000	1 Dokumen	Rp.	5.512.500	1 Dokumen	Rp.	5.788.125	Kasubbag Keuangan dan Aset
																Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	Rp.	295.848.000	1 Dokumen	Rp.	310.640.400	1 Dokumen	Rp.	326.172.420	Kasubbag Keuangan dan Aset
																Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		4 Dokumen	Rp.	74.550.000	4 Dokumen	Rp.	78.277.500	4 Dokumen	Rp.	82.191.375	Kasubbag Keuangan dan Aset
																Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	Rp.	23100000	1 Dokumen	Rp.	24.255.000	1 Dokumen	Rp.	25.467.750	Kasubbag Keuangan dan Aset

PROGRAM							KEGIATAN							SUB KEGIATAN							Penanggung Jawab				
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET				KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET				SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Catatan	Target							
			Kondisi Awal	2024	2025	2026				Kondisi Akhir	Kondisi Awal	2024	2025					2026	Kondisi Akhir	2024		Rp.	2025	Rp.	2026
														Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	Rp. 23.935.250	1 Dokumen	Rp. 25.132.013	1 Dokumen	Rp. 26.388.613	Kasubag Renja dan Monev	
														Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	Rp. 25.200.000	12 Laporan	Rp. 26.460.000	12 Dokumen	Rp. 27.783.000	Kasubag Keuangan dan Aset	
														Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		NA	NA	NA	NA	NA	NA		
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kasubag Umum dan Aparatur
														Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	Rp. 42.634.856	1 Paket	Rp. 44.766.599	1 Paket	Rp. 47.004.929	Kasubag Umum dan Aparatur	
														Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	Rp. 108.150.000	1 Dokumen	Rp. 113.557.500	1 Dokumen	Rp. 119.235.375	Kasubag Umum dan Aparatur	
														Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dokumen	17850000	1 Dokumen	Rp. 18.742.500	1 Dokumen	Rp. 19.679.625		
														Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	24150000	1 Dokumen	Rp. 25.357.500	1 Dokumen	Rp. 26.625.375		
														Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		NA	NA	NA	NA	NA	NA		
														Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		NA	NA	NA	NA	NA	NA		
														Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan		NA	NA	NA	NA	NA	NA		
														Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Mengikuti Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		50 PNS	Rp. 41.464.500	50 PNS	Rp. 43.537.725	50 orang	Rp. 45.714.611	Kasubag Umum dan Aparatur	
														Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kasubag Umum dan Aparatur	
														Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		50 PNS	Rp. 25.179.000	50 PNS	Rp. 26.437.950	50 orang	Rp. 27.759.848	Kasubag Umum dan Aparatur	

PROGRAM						KEGIATAN										SUB KEGIATAN										Penanggung Jawab
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Catatan	Target						
			Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir					2024	Rp.	2025	Rp.	2026	Rp.	
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp. 33.237.664	1 Dokumen	Rp. 34.899.549	1 Dokumen	Rp. 36.644.527	Kasubag Keuangan dan Aset		
														Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp. 28.875.000	1 Dokumen	Rp. 30.318.750	1 Dokumen	Rp. 31.834.688	Kasubag Keuangan dan Aset			
														Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Rp. 28.875.000	1 Laporan	Rp. 30.318.750	1 Laporan	Rp. 31.834.688	Kasubag Keuangan dan Aset			
														Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp. 28.875.000	1 Laporan	Rp. 30.318.750	1 Laporan	Rp. 31.834.688	Kasubag Keuangan dan Aset			
														Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp. 28.875.000	1 Laporan	Rp. 30.318.750	1 Laporan	Rp. 31.834.688	Kasubag Keuangan dan Aset			
														Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp. 28.875.000	1 Laporan	Rp. 30.318.750	1 Laporan	Rp. 31.834.688	Kasubag Keuangan dan Aset			
														Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp. 28.875.000	1 Dokumen	Rp. 30.318.750	1 Dokumen	Rp. 31.834.688	Kasubag Keuangan dan Aset			
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 30.448.688	1 Paket	Rp. 31.971.122	1 Paket	Rp. 33.569.678	Kasubag Umum dan Aparatur		
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 46.435.830	1 Paket	Rp. 48.757.622	1 Paket	Rp. 51.195.503	Kasubag Umum dan Aparatur			
														Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp. 11.291.280	1 Paket	Rp. 11.855.844	1 Paket	Rp. 12.448.636	Kasubag Umum dan Aparatur			
														Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp. 67.158.000	1 Paket	Rp. 70.515.900	1 Paket	Rp. 74.041.695	Kasubag Umum dan Aparatur			
														Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp. 20.999.790	1 Paket	Rp. 22.049.780	1 Paket	Rp. 23.152.268	Kasubag keuangan dan Aset			
														Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Rp. 6.720.000	5 Dokumen	Rp. 7.056.000	5 Dokumen	Rp. 7.408.800	Kasubag Umum dan Aparatur			
														Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kasubag Umum dan Aparatur		
														Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Dokumen	Rp. 20.815.200	1 Dokumen	Rp. 21.855.960	1 Dokumen	Rp. 22.948.758	Kasubag Umum dan Aparatur			

PROGRAM							KEGIATAN					SUB KEGIATAN										Penanggung Jawab			
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET				KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Catatan	Target						
			Kondisi Awal	2024	2025	2026				Kondisi Akhir	Kondisi Awal	2024	2025	2026					Kondisi Akhir	2024	Rp.		2025	Rp.	2026
															Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Dokumen	Rp. 196.138.950	1 Dokumen	Rp. 205.945.898	1 Dokumen	Rp. 216.243.192	Kasubag Umum dan Aparatur
															Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	Rp. 15.750.000	1 Dokumen	Rp. 16.537.500	1 Dokumen	Rp. 17.364.375	Kasubag Umum dan Aparatur
															Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		NA	NA	NA	NA	NA	NA	
							Pengadaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan								Kasubag Keuangan dan Aset
														Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan									Kasubag Keuangan dan Aset
														Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 paket	Rp. 73.500.000	1	Rp. 77.175.000	1 paket	Rp. 81.033.750	Kasubag Keuangan dan Aset	
														Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 Unit	Rp. 136.500.000	6 Unit	Rp. 143.325.000	6 Unit	Rp. 150.491.250	Kasubag Keuangan dan Aset	
														Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		1 Unit	Rp. 57.750.000	1 Unit	Rp. 60.637.500	1 Unit	Rp. 66.669.375	Kasubag Keuangan dan Aset	
														Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan									Kasubag Keuangan dan Aset
														Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan									Kasubag Keuangan dan Aset
														Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan									Kasubag Keuangan dan Aset
														Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			1 paket	Rp. 17.850.000	1 Paket	Rp. 18.742.500	1 Unit	Rp. 19.679.625	Kasubag Keuangan dan Aset	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	Rp. 1.991.925	1 Laporan	Rp. 2.191.118	1 Laporan	Rp. 2.410.229	Kasubag Umum dan Aparatur
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	Rp. 216.500.000	1 Laporan	Rp. 238.150.000	1 Laporan	Rp. 261.965.000	Kasubag Umum dan Aparatur	





**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**